



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI, RISET DAN INOVASI, DAN INDUSTRI)**

Tahun Sidang	:	2021- 2022
Masa Persidangan	:	IV
Rapat	:	Ke - 6 (Enam)
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	:	Ketua Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Selasa, 22 Maret 2022
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB s.d 12.45 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai I, secara tatap muka dan <i>virtual</i>
Acara	:	1. Penjelasan tentang proses pencabutan izin usaha pertambangan nikel 2. Lain-lain
Ketua Rapat	:	Dony Maryadi Oekon (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F.PDI-Perjuangan)
Sekretaris Rapat	:	Dra. Nanik Herry Murti
Hadir	:	A. Pemerintah 1. Ketua Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) B. 25 Orang Anggota dari 53 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI terdiri dari: 13 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik 12 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual 28 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa, 22 Maret 2022 dibuka pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Dony Maryadi Oekon, selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Penjelasan tentang proses pencabutan izin usaha pertambangan nikel
 - b. Lain-lain

II. CATATAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI telah mendengarkan pemaparan dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) tentang pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan oleh Menteri Investasi/BKPM RI atas nama Menteri ESDM RI. Terkait hal tersebut, Komisi VII DPR RI akan mendorong pemerintah c.q Menteri ESDM RI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pencabutan IUP terutama pada perusahaan yang telah melakukan kegiatan dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Komisi VII DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Menteri ESDM RI dan Menteri Investasi/BKPM RI terkait kewenangan dan proses pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
3. Komisi VII DPR RI meminta Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) untuk menyampaikan jawaban tertulis disertai data-data atas seluruh pertanyaan Anggota DPR RI dan disampaikan ke sekretariat Komisi VII paling lambat pada tanggal 29 Maret 2022.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 12.45 WIB

Jakarta, 22 Maret 2022

KETUA RAPAT,


DONY MARYADI OEKON
A-176